JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 28 Maret 2026 | **Revised**: 20 April 2026 | **Accepted**: 29 April 2026

Kerja Sama Stratejik Indonesia, Filipina dan Malaysia Dalam Menanggulangi Terorisme Maritim di Laut Sulu-Sulawesi

Fritz Carlo Alexis Hartono[1], Muhamad Syauqillah[2].
[1] Departemen Kajian Stratejik, Ketahanan dan Keamanan, Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia,
fritzhartono98@gmail.com
[2] Departemen Kajian Stratejik, Ketahanan dan Keamanan, Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia,
muhamadsyauqillah@ui.ac.id

Corresponding Author: fritzhartono98@gmail.com

Abstract: *This study analyzes the trilateral cooperation between Indonesia, Malaysia, and the Philippines (IMF) in the Sulawesi Sea as a response to the threat of cross-border maritime terrorism that cannot be effectively addressed through a unilateral approach. Through a qualitaive descriptive approach, this study aims to analyze the vulnerability of the border security in Sulu-Sulawesi Sea. As a border region and international shipping lane connecting Indonesia, Malaysia, and the Philippines, this area is vulnerable to transnational crimes, including the activities of groups such as the Abu Sayyaf Group. Through the establishment of the Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) and Trilateral Maritime Patrol (TMP), the three countries have shifted to a more coordinated cooperative security approach. This study fills the gap by showing the results of decrease in incidents of kidnapping and maritime attacks through joint patrols and intelligence sharing, although its effectiveness remains influenced by domestic conditions, particularly security stability in the southern Philippines.Theoretically, this cooperation reflects the efforts of Southeast Asian countries to balance national sovereignty with collective security needs through flexible and consensus-based mechanisms. The involvement of external actors such as the United States and Australia indicates broader geopolitical dynamics, but the IMF remains important for maintaining regional security autonomy. However, challenges such as capacity asymmetry, limitations of international law, and dependence on domestic stability still limit its effectiveness, requiring the strengthening of non-military cooperation and the development of border areas to ensure sustainable maritime stability.*

Keyword: *cooperative security, regional security governance, trilateral cooperation, Sulawesi Sea, maritime terrorism, IMF (Indonesia–Malaysia–Philippines), TCA, TMP.*

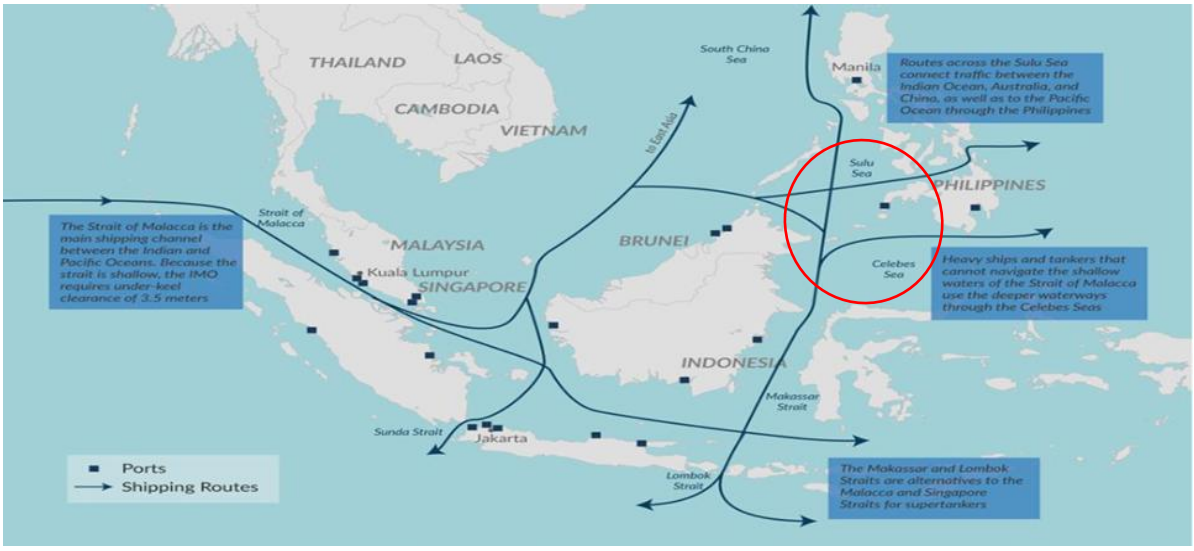
Abstrak: Penelitian ini menganalisis kerja sama trilateral Indonesia–Malaysia–Filipina (IMF) di Laut Sulawesi sebagai respons terhadap ancaman terorisme maritim lintas batas yang tidak

dapat ditangani secara efektif melalui pendekatan unilateral. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, studi ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan keamanan perbatasan di Laut Sulu-Sulawesi. Sebagai wilayah perbatasan dan jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina, kawasan ini rentan terhadap kejahatan transnasional, termasuk aktivitas kelompok seperti Abu Sayyaf Group. Melalui pembentukan *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) dan Trilateral Maritime Patrol (TMP), ketiga negara beralih ke pendekatan *cooperative security* yang lebih terkoordinasi. Studi ini mengisi kekosongan dengan menunjukkan hasil penurunan insiden penculikan dan serangan maritim melalui patroli bersama serta pertukaran intelijen, meskipun efektivitasnya tetap dipengaruhi kondisi domestik, terutama stabilitas keamanan di Filipina Selatan. Secara teoretis, kerja sama ini mencerminkan upaya negara-negara Asia Tenggara menyeimbangkan kedaulatan nasional dengan kebutuhan keamanan kolektif melalui mekanisme yang fleksibel dan berbasis konsensus. Keterlibatan aktor eksternal seperti Amerika Serikat dan Australia menunjukkan adanya dinamika geopolitik yang lebih luas, namun IMF tetap penting untuk menjaga otonomi keamanan kawasan. Meski demikian, tantangan seperti asimetri kapasitas, keterbatasan hukum internasional, dan ketergantungan pada stabilitas domestik masih membatasi efektivitasnya, sehingga diperlukan penguatan kerja sama non-militer dan pembangunan kawasan perbatasan guna memastikan stabilitas maritim yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Cooperative security*, *regional security governance*, kerja sama trilateral, Laut Sulawesi, terorisme maritim, IMF (Indonesia–Malaysia–Filipina), TCA, TMP.

PENDAHULUAN

Laut Sulawesi merupakan salah satu kawasan maritim strategis di Asia Tenggara yang terletak di antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Secara geografis, Laut Sulawesi menghubungkan Samudra Pasifik dengan perairan Nusantara dan menjadi bagian dari jalur laut yang menghubungkan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Australia (Pradityo, 2025). Posisi ini menjadikan Laut Sulawesi sebagai ruang laut yang memiliki nilai strategis tinggi, baik dari sisi ekonomi, keamanan, maupun politik internasional.



Sumber: Amling et al., 2019, hal.10

Gambar 1. Jalur Laut Sulu-Sulawesi dan Sekitarnya

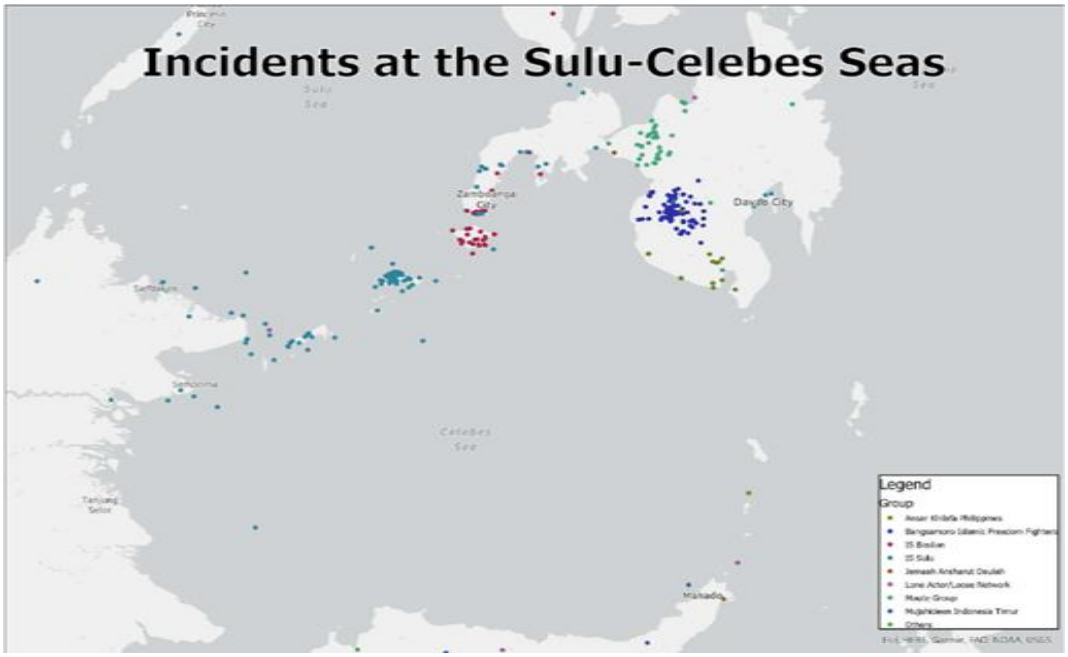
Dari perspektif lalu lintas internasional, Laut Sulawesi berfungsi sebagai jalur pelayaran penting bagi kapal-kapal niaga yang mengangkut komoditas energi, hasil tambang, dan barang manufaktur (Air and Space Center, 2025). Kawasan ini juga terhubung dengan Alur

Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yang diakui secara internasional berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982. Dengan demikian, stabilitas keamanan di Laut Sulawesi tidak hanya berkaitan dengan kepentingan negara-negara pesisir, tetapi juga kepentingan global, khususnya negara-negara pengguna jalur laut internasional.

Dalam konteks hubungan internasional, Laut Sulawesi merupakan ruang interaksi lintas negara yang kompleks. Kepentingan ekonomi, keamanan, dan kedaulatan saling bertemu di kawasan ini. Indonesia, Malaysia, dan Filipina memiliki kepentingan langsung karena wilayah perairan ini berbatasan dengan teritori mereka. Namun, negara-negara lain, termasuk kekuatan besar, juga memiliki kepentingan tidak langsung terkait kebebasan navigasi, keamanan perdagangan internasional, dan stabilitas kawasan Asia Tenggara.

Meskipun memiliki nilai strategis tinggi, Laut Sulawesi juga dikenal sebagai kawasan dengan tingkat kerawanan keamanan yang cukup kompleks. Permasalahan di kawasan ini meliputi pembajakan laut, penyelundupan senjata dan narkotika, perdagangan manusia, *illegal fishing*, serta sengketa perbatasan maritim. Karakteristik geografis berupa perairan luas, banyak pulau kecil, dan garis pantai yang panjang menjadikan kawasan ini sulit diawasi secara optimal oleh satu negara saja.

Di antara berbagai persoalan tersebut, isu terorisme maritim menjadi salah satu ancaman paling serius karena memiliki dampak lintas batas dan berpotensi mengganggu stabilitas regional. Terorisme di Laut Sulawesi tidak hanya mengancam keamanan nasional negara-negara pesisir, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap keselamatan pelayaran internasional dan aktivitas ekonomi global (Haikal, dkk., 2024).



Sumber: South East Asia Militant Atlas, Rajaratnam School of International Studies, International Centre for Political Violence and Terrorism Research, 2021

Gambar 2. Insiden di Laut Sulu-Sulawesi dari tahun 2014-2020

Isu terorisme di kawasan Laut Sulawesi mulai mendapat perhatian serius sejak awal dekade 2000-an, seiring dengan meningkatnya aktivitas kelompok teror bersenjata di Asia Tenggara. Kawasan perbatasan laut antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina menjadi ruang yang dimanfaatkan oleh kelompok teroris karena lemahnya pengawasan, keterbatasan kapasitas aparat, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat pesisir yang rentan (ICCT, 2025).

Salah satu aktor utama dalam dinamika terorisme di kawasan ini adalah kelompok Abu Sayyaf Group (ASG) yang berbasis di Filipina Selatan. Kelompok ini dikenal melakukan penculikan untuk tebusan, serangan bersenjata, serta kerja sama dengan jaringan teroris

transnasional lainnya. Laut Sulawesi kerap digunakan sebagai jalur mobilitas, pelarian, dan logistik oleh kelompok-kelompok tersebut.

Perkembangan terorisme di Laut Sulawesi mengalami eskalasi signifikan pada pertengahan 2010-an. Serangkaian kasus penculikan anak buah kapal (ABK) Indonesia dan Malaysia oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan perbatasan menjadi sorotan internasional (Banlaoi, 2005). Peristiwa penculikan lain di laut Sulu-Sulawesi juga terjadi di Tanggal 20 Juli Tahun 2016, ketika terdapat 10 Warga Negara Indonesia bekerja sebagai nelayan yang disergap dan ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan Sulu. Tiga tawanan dilepaskan di hari yang sama, sedangkan keujuh tawanan ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf. Dua orang tawanan berhasil melarikan diri pada tanggal 17 Agustus 2016, kemudian tanggal 1 Oktober, 2016, tiga tawanan dibebaskan, dan pada akhirnya dua tawanan yang tersisa dibebaskan pada tanggal 12 Desember, 2016. Kelompok Teroris Abu Sayyaf telah menawan para sandera selama 175 hari dan meminta tebusan uang kepada pemerintah Republik Indonesia untuk pembebasan para sandera senilai 2.421.161 Dollar Amerika Serikat, atau sekitar Rp.31.709.956.617 (Kurs US Dollar Juli 2016). Meskipun pada akhirnya seluruh tawanan berhasil dibebaskan tanpa ada tawanan yang meninggal dunia melalui diplomasi dan negosiasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Filipina dan kelompok Teroris Abu Sayyaf, namun peristiwa tersebut telah menimbulkan rasa ketidakamanan bagi siapa saja yang melintasi perairan Sulu (Global Terrorism Database, 2020). Kasus-kasus ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi, tetapi juga memperlihatkan keterbatasan respons unilateral negara dalam menghadapi ancaman terorisme lintas batas.

Puncak perhatian regional dan internasional terjadi ketika frekuensi penculikan dan serangan meningkat secara signifikan dan mendapatkan liputan luas media global. Situasi ini menimbulkan tekanan politik domestik dan internasional terhadap pemerintah Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk mengambil langkah konkret dan terkoordinasi dalam menjamin keamanan kawasan.

Sebelum terbentuknya kolaborasi trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina, berbagai upaya penanggulangan terorisme telah dilakukan, baik secara unilateral maupun melalui mekanisme multilateral yang lebih luas. Filipina, misalnya, melakukan operasi militer intensif di wilayah Mindanao untuk menekan kelompok teroris. Indonesia dan Malaysia juga meningkatkan patroli laut nasional serta kerja sama intelijen terbatas.

Pada tingkat regional, ASEAN telah memiliki kerangka kerja sama kontra-terorisme melalui ASEAN *Convention on Counter Terrorism* (ACCT). Namun, kerangka ini dinilai belum cukup efektif dalam menjawab ancaman spesifik di Laut Sulawesi yang bersifat sangat lokal sekaligus transnasional. Keterlibatan aktor eksternal seperti Amerika Serikat juga terlihat melalui program peningkatan kapasitas dan bantuan keamanan, meskipun tidak secara langsung memimpin operasi di kawasan tersebut (Wismayana, 2023).

Kondisi keamanan yang semakin memburuk akhirnya mendorong Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk membangun kolaborasi strategis yang lebih terstruk tur (Yaoren, 2021). Kerja sama ini diwujudkan melalui mekanisme *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) dan patroli terkoordinasi di Laut Sulawesi. Kolaborasi ini mencakup patroli laut dan udara bersama, pertukaran informasi intelijen, serta koordinasi kebijakan keamanan maritim.

Kolaborasi trilateral ini mencerminkan perubahan pendekatan dari respons nasional menuju pendekatan keamanan kolektif. Kerja sama tersebut juga menunjukkan kesadaran bersama bahwa ancaman terorisme di Laut Sulawesi tidak dapat ditangani secara efektif tanpa koordinasi lintas negara.

Sejumlah studi internasional telah mengkaji posisi strategis Laut Sulawesi–Sulu serta ancaman keamanan maritim di kawasan tersebut, namun fokusnya bervariasi antara analisis ancaman non-tradisional dan efektivitas kerjasama keamanan. Salah satu studi penting yang berkontribusi pada pemahaman ini adalah kajian oleh Pradityo (2024), yang menggarisbawahi

bahwa perairan Sulu dan Sulawesi merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kriminalitas maritim, termasuk pembajakan, penculikan, serta terorisme yang berakar pada aktivitas kelompok-kelompok bersenjata di Filipina Selatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi kerawanan ini mendorong tiga negara pesisir untuk merintis kerja sama trilateral sejak 2016 dalam bentuk INDOMALPHI, yang terus diperkuat meskipun menghadapi hambatan seperti pandemi COVID-19 dan tantangan koordinasi. Studi ini menggunakan kerangka konsep *maritime insecurity* untuk menilai hubungan ancaman terhadap kebutuhan keamanan kolektif, memberikan dasar empiris penting bagi penelitian tentang keamanan maritim regional (Pradityo,2024)

Selaras dengan itu, Wiswayana (2023) memberikan kontribusi teoritis dengan membahas *cooperative security framework* sebagai arsitektur kerja sama Indonesia, Malaysia, dan Filipina di perairan Sulu — yang secara geostrategis saling terkait dengan Laut Sulawesi. Studi ini menekankan bahwa trilateral *cooperation* bukan sekadar respons terhadap ancaman tertentu, tetapi merupakan kerangka hubungan internasional di mana keamanan individu, pemeliharaan perdamaian, perlindungan bersama, dan promosi stabilitas menjadi pilar penting. Pendekatan tersebut menyediakan landasan teoretis yang memperkuat alasan mengapa kerja sama trilateral diperlukan, khususnya dalam menangani ancaman lintas batas yang tidak dapat diatasi secara parsial oleh satu negara (Wismayana, 2023).

Lebih jauh, Haikal, Wahyudin, dan Mahmuluddin (2024) mengeksplorasi peran *maritime diplomacy* Indonesia dalam menghadapi ancaman terorisme maritim di kawasan Sulu–Sulawesi. Penelitian ini menunjukkan bahwa ancaman maritim tidak hanya bersifat keamanan nasional, tetapi juga berdampak terhadap hubungan internasional yang lebih luas sehingga membutuhkan pendekatan kolaboratif di luar kapasitas nasional masing-masing negara. Studi ini mencatat bahwa berbagai upaya *maritime diplomacy* oleh Indonesia telah berkontribusi dalam mereduksi aktivitas terorisme di wilayah tersebut dari waktu ke waktu, sekaligus menunjukkan perlunya koordinasi lintas negara yang lebih sistematis (Haikal, dkk., 2024).

Ketiga studi di atas menegaskan bahwa ancaman di Laut Sulawesi–Sulu bersifat transnasional, sehingga memerlukan solusi yang melibatkan koordinasi antarnegara. Meskipun demikian, ketiga studi tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya masih terfokus pada aspek tertentu (misalnya ancaman kriminal atau kerangka kerja sama secara umum) dan tidak selalu memadukan secara mendalam antara dinamika terorisme, mekanisme Kerjasama trilateral, dan implikasinya terhadap keamanan maritim regional secara simultan. Itulah sebabnya kajian yang secara eksplisit menganalisis kolaborasi strategis trilateral Indonesia-Malaysia Filipina dalam konteks Laut Sulawesi, khususnya dari perspektif hubungan internasional dan keamanan regional, masih terbatas menjadi gap penting yang ditangani oleh penelitian ini.

Melalui latar belakang, peneliti ingin merumuskan bagaimana efektivitas kerjasama trilateral antara negara Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam menanggulangi terorisme maritim di Laut Sulu-Sulawesi. Kemudian Berdasarkan tinjauan tersebut, Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan efektivitas dari kerjasama strategis yang telah dilakukan oleh ketiga negara. Lebih lanjut, terdapat gap penelitian yang signifikan, pertama, masih minim kajian komprehensif yang menganalisis kolaborasi trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina sebagai strategi keamanan kolektif dalam menanggulangi terorisme di Laut Sulawesi. Kedua, belum banyak penelitian yang mengaitkan kerja sama ini dengan dinamika hubungan internasional, kepentingan nasional, dan keamanan maritim regional secara simultan.

Oleh karena itu, penelitian mengenai Kolaborasi Stratejik Indonesia, Malaysia dan Filipina menjadi penting untuk mengisi kekosongan akademik tersebut. Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan empiris dalam kajian keamanan regional Asia Tenggara, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan bagi penguatan kerja sama keamanan maritim di kawasan perbatasan laut.

METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam dinamika kolaborasi strategis antar Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam menanggulangi terorisme di Laut Sulu-Sulawesi. Pendekatan tersebut dipilih karena fenomena kerjasama regional dan terorisme maritim memiliki sifat yang kompleks serta kontekstual, sehingga analisis difokuskan untuk menggambarkan kondisi keamanan di Kawasan sekaligus menelusuri mekanisme kolaborasi trilateral yang terbentuk.

Kebijakan keamanan trilateral antar Indonesia, Malaysia dan Filipina, menjadi unit analisis dalam penelitian ini, khususnya yang diimplementasikan dalam *Trilateral Maritime Patrol* (TMP) dan kerangka kerja sama keamanan di Sub-Kawasan Laut Sulu-Sulawesi. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan dan diimplementasikan sebagai respons terhadap ancaman terorisme lintas batas.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini mengandalkan data sekunder karena isu yang dikaji bersifat lintas negara dan terdokumentasi secara luas. Data diperoleh dari artikel jurnal internasional bereputasi, laporan organisasi regional seperti ASEAN dan *International Maritime Organization* (IMO), serta dokumen kebijakan resmi dari ketiga negara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menyeleksi literatur berdasarkan relevansi dan kredibilitas, terutama sumber dari lima tahun terakhir untuk menjaga aktualitas data.

Teknik Analisis Data Analisis dilakukan menggunakan *thematic analysis* untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola (tema) yang terkandung di dalam data sekunder yang telah dikumpulkan. Proses ini melibatkan reduksi data, penyajian secara tematis dalam bentuk narasi analitis, dan penarikan kesimpulan.

Kerangka Teoritis Untuk memberikan tajaman analisis, analisis menggunakan kerangka *cooperative security*. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana negara-negara di kawasan Sulu-Sulawesi membangun rasa saling percaya (*confidence building measures*) dan mengedepankan kolaborasi multilateral alih-alih persaingan militer. Melalui lensa *cooperative security*, penelitian ini membedah sejauh mana transparansi dan interaksi kelembagaan antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina mampu menciptakan stabilitas keamanan kolektif dalam menghadapi ancaman terorisme maritim.

Keabsahan Data

Untuk menjaga keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan Teknik triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai jenis sumber, seperti jurnal akademik, laporan institusional, dan dokumen kebijakan resmi (Ruggiano dan Perry, 2019). Dengan demikian, analisis yang dihasilkan tidak bergantung pada satu sumber tunggal, melainkan didukung oleh berbagai perspektif yang saling melengkapi.

Selain itu, pemilihan sumber data yang berasal dari publikasi akademik internasional bereputasi dan dokumen resmi lembaga terkait diharapkan dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerja Sama Trilateral Indonesia–Malaysia–Filipina dalam Menghadapi Ancaman Terorisme Maritim di Laut Sulawesi

1) Posisi Strategis Laut Sulawesi dalam Keamanan Regional Asia Tenggara

Laut Sulawesi merupakan salah satu ruang maritim paling strategis di Asia Tenggara karena posisinya yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan perairan

Nusantara serta menjadi bagian penting dari jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Asia Timur, Asia Tenggara, dan Australia. Dalam perspektif Hubungan Internasional, posisi geografis ini menempatkan Laut Sulawesi sebagai bagian dari *regional maritime commons* yang kepentingannya tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga regional dan global. Nilai strategis tersebut tercermin dari tingginya volume perdagangan internasional yang melintasi kawasan ini serta keterkaitannya dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang diakui secara internasional berdasarkan UNCLOS 1982 (Storey, 2018; Franco, 2018).

Namun, nilai strategis tersebut juga menghasilkan kerentanan keamanan yang tinggi. Karakteristik geografis berupa perairan luas, garis pantai panjang, serta keberadaan banyak pulau kecil dan wilayah perbatasan laut yang belum sepenuhnya terdelimitasi menciptakan ruang abu-abu keamanan (*security vacuum*). Dalam kerangka Regional *Security Complex Theory* (RSCT), Laut Sulawesi dapat dipahami sebagai sub-kompleks keamanan regional di mana ancaman, persepsi keamanan, dan respons kebijakan negara-negara pesisir saling terkait secara intens dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Tumilaar et al., 2025; Raharjo et al., 2024).

2) Dinamika Ancaman Terorisme Maritim di Laut Sulawesi

Ancaman terorisme maritim di Laut Sulawesi tidak dapat dilepaskan dari dinamika konflik bersenjata non-negara di Filipina Selatan, khususnya yang melibatkan Abu Sayyaf Group (ASG). Berbeda dengan bentuk terorisme konvensional, terorisme maritim di kawasan ini beririsan erat dengan kejahatan transnasional lainnya seperti pembajakan, penculikan untuk tebusan, penyelundupan senjata, dan perdagangan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman yang muncul bersifat hibrida, menggabungkan motif ideologis, ekonomi, dan kriminal (East, 2018; Franco, 2018).

Sejumlah studi menunjukkan bahwa eskalasi penculikan anak buah kapal (ABK) pada pertengahan 2010-an merupakan titik balik meningkatnya perhatian regional terhadap keamanan Laut Sulawesi. Penculikan yang dilakukan ASG terhadap warga negara Indonesia dan Malaysia tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi dan korban jiwa, tetapi juga memperlihatkan keterbatasan pendekatan keamanan unilateral. Dari sudut pandang keamanan internasional, insiden-insiden ini memperkuat argumen bahwa ancaman maritim di Laut Sulawesi bersifat transnasional dan menembus batas kedaulatan negara (Storey, 2018; Tumilaar et al., 2025).

3) Respons Negara dan Keterbatasan Pendekatan Unilateral

Sebelum terbentuknya mekanisme kerja sama trilateral, Indonesia, Malaysia, dan Filipina cenderung merespons ancaman terorisme maritim melalui pendekatan nasional. Filipina melakukan operasi militer intensif di Mindanao, sementara Indonesia dan Malaysia meningkatkan patroli laut nasional serta kerja sama intelijen terbatas. Meskipun langkah-langkah tersebut menunjukkan komitmen negara terhadap keamanan nasional, efektivitasnya relatif terbatas karena ancaman bergerak lintas batas dan memanfaatkan celah yurisdiksi (Franco, 2018; Mahmud, 2020).

Dalam perspektif Hubungan Internasional, kondisi ini mencerminkan dilema klasik kedaulatan dan keamanan. Negara tetap mempertahankan prinsip non-intervensi dan sensitivitas kedaulatan, tetapi pada saat yang sama menghadapi ancaman yang tidak dapat ditangani secara efektif tanpa koordinasi lintas negara. Keterbatasan inilah yang kemudian mendorong pergeseran pendekatan dari keamanan nasional menuju keamanan kolektif (Raharjo et al., 2024).

4) Kerja Sama Trilateral sebagai Strategi Keamanan Kolektif

Pembentukan kerja sama trilateral Indonesia–Malaysia–Filipina melalui *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) dan Trilateral Maritime Patrol (TMP) menandai perubahan penting dalam cara negara-negara pesisir memandang keamanan maritim

kawasan. Storey (2018) menekankan bahwa mekanisme ini lahir bukan semata sebagai respons teknis terhadap peningkatan penculikan, tetapi sebagai konsekuensi dari kegagalan pendekatan unilateral dalam menghadapi ancaman lintas batas.

Dalam konteks *cooperative security*, kerja sama tersebut menunjukkan pergeseran dari paradigma keamanan nasional menuju keamanan kolektif yang lebih pragmatis. Alih-alih membentuk aliansi militer formal, Indonesia, Malaysia, dan Filipina memilih pendekatan koordinatif yang tetap menjaga sensitivitas kedaulatan masing-masing negara. Sejalan dengan temuan Tumilaar et al. (2025), model kerja sama ini mencerminkan karakter khas keamanan Asia Tenggara yang berbasis konsensus dan kepercayaan bertahap, bukan integrasi struktural penuh.

5) Diplomasi Pertahanan dan Dimensi Hubungan Internasional

Kerja sama trilateral di Laut Sulawesi juga mencerminkan praktik diplomasi pertahanan sebagai instrumen non-koersif dalam Hubungan Internasional. Melalui diplomasi pertahanan, angkatan bersenjata dan institusi pertahanan tidak hanya berfungsi sebagai alat kekuatan keras, tetapi juga sebagai sarana membangun kepercayaan, meningkatkan interoperabilitas, dan mengurangi ketegangan antarnegara (Mahmud, 2020; Maramis et al., 2024).

Indonesia memainkan peran penting dalam mendorong terbentuknya kerja sama trilateral ini, baik melalui inisiatif diplomatik maupun kepemimpinan normatif. Dari sudut pandang hubungan internasional, peran ini memperkuat posisi Indonesia sebagai *regional security provider* di Asia Tenggara, khususnya dalam isu keamanan maritim non-tradisional (Mahmud, 2020).

6) Implementasi Lapangan dan Tantangan Struktural

Meskipun kerja sama trilateral Indonesia–Malaysia–Filipina sering diposisikan sebagai capaian penting dalam pengelolaan keamanan maritim di Laut Sulawesi, praktik di tingkat lapangan memperlihatkan gambaran yang lebih berlapis. Efektivitas kerja sama tersebut, pada kenyataannya, tidak semata ditentukan oleh intensitas patroli atau frekuensi operasi bersama. Faktor-faktor seperti struktur kelembagaan, kapasitas nasional, serta batasan hukum masing-masing negara memainkan peran yang sama pentingnya. Franco (2018) mencatat bahwa kerja sama keamanan maritim di kawasan Sulu–Sulawesi berlangsung dalam ruang yurisdiksi yang terbatas, sehingga hasil operasionalnya sangat dipengaruhi oleh konteks politik dan hukum nasional.

Salah satu tantangan utama terletak pada perbedaan kapasitas militer dan penegakan hukum antarnegara. Indonesia dan Malaysia relatif memiliki kemampuan patroli laut dan udara yang lebih mapan dibandingkan Filipina, terutama dalam hal jumlah alutsista, sistem pengawasan maritim, dan dukungan logistik. Asimetri kapasitas ini, sebagaimana dicatat oleh Raharjo et al. (2024), berdampak pada pembagian peran operasional dalam Trilateral Maritime Patrol, di mana efektivitas patroli sering kali sangat bergantung pada kesiapan satu atau dua negara tertentu. Kondisi ini menciptakan ketergantungan struktural yang berpotensi melemahkan keberlanjutan kerja sama dalam jangka panjang.

Tantangan koordinasi operasional muncul secara berulang dalam pelaksanaan patroli trilateral. Perbedaan struktur komando, standar operasional prosedur (SOP), serta mekanisme komunikasi antar-lembaga membuat integrasi operasional tidak selalu berjalan lancar. Dalam situasi tertentu, koordinasi lintas negara justru membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan operasi nasional. Tumilaar et al. (2025) menunjukkan bahwa pertukaran informasi intelijen, meskipun telah difasilitasi melalui pusat komando bersama, masih dibatasi oleh sensitivitas data dan kepentingan nasional. Kondisi ini tidak sepenuhnya menggagalkan kerja sama, tetapi secara nyata membatasi capaian efektivitasnya.

Lebih jauh, akar masalah terorisme maritim yang berkelindan dengan kondisi sosial-ekonomi di Filipina Selatan menegaskan keterbatasan pendekatan keamanan semata. Kemiskinan, lemahnya kontrol negara di wilayah tertentu, serta keterkaitan kelompok bersenjata dengan jaringan kriminal transnasional menciptakan lingkungan yang kondusif bagi regenerasi ancaman. Dalam konteks ini, kerja sama trilateral di Laut Sulawesi menghadapi dilema klasik antara kebutuhan respons keamanan jangka pendek dan tuntutan solusi struktural jangka panjang yang bersifat non-militer (Raharjo et al., 2024).

7) Keterbatasan Hukum Internasional dan Masalah Yurisdiksi Maritim

Di luar tantangan operasional, implementasi kerja sama trilateral di Laut Sulawesi juga dibatasi oleh kerangka hukum internasional yang mengatur yurisdiksi negara di wilayah laut. Prinsip kedaulatan dan yurisdiksi teritorial dalam hukum laut internasional membatasi kewenangan aparat keamanan suatu negara untuk melakukan penindakan di luar wilayah perairannya. Franco (2018) menekankan bahwa keterbatasan ini kerap dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan lintas negara, termasuk kelompok teroris maritim, untuk menghindari penangkapan dengan berpindah lintas batas yurisdiksi.

Dalam konteks yurisdiksi maritim, isu penerapan prinsip *hot pursuit* menjadi salah satu persoalan yang paling sering muncul. Secara normatif, hukum laut internasional memang mengakui hak pengejaran seketika. Namun, dalam praktik di Laut Sulawesi, penerapan prinsip ini jarang berjalan ideal. Aparat keamanan kerap dihadapkan pada pilihan sulit antara melanjutkan pengejaran dan menghormati batas kedaulatan negara lain. Storey (2018) menunjukkan bahwa keterbatasan tersebut membuka ruang bagi pelaku kejahatan lintas negara untuk berpindah yurisdiksi dan menghindari penindakan, sebuah celah yang sulit ditutup hanya melalui patroli terkoordinasi.

Selain itu, perbedaan sistem hukum nasional dan mekanisme penuntutan pidana turut mempersulit proses penegakan hukum lintas negara. Kasus penculikan dan terorisme maritim sering kali melibatkan pelaku, korban, dan lokasi kejadian yang berada di yurisdiksi berbeda, sehingga menuntut koordinasi hukum yang kompleks. Tumilaar et al. (2025) mencatat bahwa absennya mekanisme ekstradisi dan penuntutan bersama yang terinstitusionalisasi secara kuat membuat kerja sama keamanan maritim di Laut Sulawesi lebih berfokus pada pencegahan daripada penegakan hukum pasca-kejadian.

Dengan demikian, keterbatasan hukum internasional dan yurisdiksi maritim menegaskan bahwa efektivitas kerja sama trilateral tidak hanya ditentukan oleh intensitas patroli, tetapi juga oleh kemampuan negara-negara pesisir untuk menyelaraskan kerangka hukum dan kebijakan nasional mereka. Tanpa upaya harmonisasi hukum yang lebih mendalam, kerja sama keamanan maritim di Laut Sulawesi akan tetap menghadapi batas struktural yang sulit diatasi hanya melalui pendekatan operasional.

Berbagai tantangan operasional, kapasitas, dan yurisdiksi yang melekat pada implementasi kerja sama trilateral di Laut Sulawesi menunjukkan bahwa persoalan keamanan maritim di kawasan ini tidak dapat dipahami semata sebagai isu teknis penegakan hukum atau patroli laut. Sebaliknya, keterbatasan-keterbatasan tersebut merefleksikan masalah yang lebih mendasar dalam pengelolaan keamanan lintas batas, khususnya terkait relasi antara kedaulatan negara, kebutuhan keamanan kolektif, dan tata kelola kawasan. Di titik inilah analisis Hubungan Internasional menjadi relevan, karena memungkinkan pembacaan yang lebih kritis terhadap bagaimana negara-negara Asia Tenggara menegosiasikan kepentingan nasional dan komitmen regional dalam menghadapi ancaman non-tradisional. Oleh karena itu, bagian selanjutnya akan mengkaji kerja sama trilateral di Laut Sulawesi melalui perspektif analitis Hubungan Internasional, guna menilai implikasi konseptual dan strategis dari praktik keamanan kolektif yang telah dibahas sebelumnya.

8) Analisis Kritis dalam Perspektif Hubungan Internasional

Dari perspektif Hubungan Internasional, kolaborasi strategis trilateral di Laut Sulawesi dapat dipahami sebagai contoh bagaimana negara-negara di Asia Tenggara menyesuaikan prinsip kedaulatan dengan kebutuhan keamanan kolektif. Kerja sama ini tidak menghapus sensitivitas kedaulatan, tetapi mengelolanya melalui mekanisme koordinasi yang fleksibel dan berbasis konsensus (Raharjo et al., 2024; Tumilaar et al., 2025).

Namun demikian, keberlanjutan kerja sama ini sangat bergantung pada stabilitas politik domestik, komitmen jangka panjang negara-negara anggota, serta kemampuan mengintegrasikan pendekatan keamanan keras dan lunak. Tanpa upaya berkelanjutan untuk mengatasi akar struktural konflik, ancaman terorisme maritim berpotensi bertransformasi dan kembali muncul dalam bentuk baru (Franco, 2018).

9) Sintesis Sementara: Dari Keamanan Operasional Menuju Tata Kelola Keamanan Kawasan

Pembahasan pada bagian-bagian sebelumnya menunjukkan bahwa kerja sama trilateral Indonesia–Malaysia–Filipina di Laut Sulawesi merupakan respons rasional terhadap karakter ancaman terorisme maritim yang bersifat lintas batas, non-tradisional, dan tidak dapat ditangani secara efektif melalui pendekatan keamanan unilateral. Sejumlah studi keamanan maritim menegaskan bahwa eskalasi penculikan dan pembajakan di kawasan Sulu–Sulawesi pada pertengahan 2010-an telah menjadi katalis utama perubahan kebijakan keamanan negara-negara pesisir (Storey, 2018; Franco, 2018). Eskalasi tersebut, khususnya yang melibatkan Abu Sayyaf Group, memaksa Indonesia, Malaysia, dan Filipina untuk meninjau ulang cara pandang mereka terhadap keamanan maritim, dari fokus semata pada kedaulatan nasional menuju kebutuhan akan koordinasi keamanan kolektif.

Dalam konteks ini, mekanisme seperti Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) dan Trilateral Maritime Patrol (TMP) dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi kebijakan keamanan yang bersifat pragmatis. Storey (2018) menekankan bahwa kerja sama tersebut dirancang bukan untuk menghapus sensitivitas kedaulatan, melainkan untuk mengelolanya melalui pengaturan operasional yang fleksibel, terbatas, dan berbasis konsensus. Pendekatan ini, sebagaimana juga dicatat oleh Tumilaar et al. (2025), mencerminkan karakter khas keamanan Asia Tenggara, di mana stabilitas kawasan lebih sering dicapai melalui kompromi dan koordinasi bertahap dibandingkan melalui integrasi keamanan yang bersifat formal dan mengikat.

Namun demikian, pembahasan ini juga memperlihatkan bahwa efektivitas kerja sama trilateral tidak dapat dilepaskan dari konteks yang lebih luas. Franco (2018) menunjukkan bahwa penurunan insiden terorisme maritim di Laut Sulawesi tidak hanya dipengaruhi oleh patroli laut terkoordinasi, tetapi juga sangat bergantung pada dinamika keamanan domestik di Filipina Selatan, khususnya operasi militer terhadap basis kelompok bersenjata di darat. Dengan kata lain, kerja sama trilateral beroperasi dalam ekosistem keamanan regional yang kompleks, di mana faktor domestik, regional, dan internasional saling berinteraksi dan membentuk hasil kebijakan keamanan.

Oleh karena itu, untuk memahami signifikansi kerja sama trilateral secara lebih mendalam, diperlukan perspektif yang melampaui evaluasi operasional semata. Raharjo et al. (2024) menekankan bahwa kerja sama lintas batas di kawasan Sulu–Sulawesi perlu dipahami sebagai bagian dari proses pembentukan tata kelola keamanan kawasan (regional security governance), yang mencakup relasi kekuasaan, norma keamanan regional, serta peran aktor internal dan eksternal. Perspektif inilah yang menjadi pijakan untuk pembahasan pada bagian selanjutnya, yang menempatkan kerja sama trilateral Indonesia–

Malaysia–Filipina di Laut Sulawesi dalam kerangka Hubungan Internasional yang lebih komprehensif.

10) Kerja Sama Trilateral dalam Perspektif Regional Security Governance

Kerja sama trilateral Indonesia–Malaysia–Filipina di Laut Sulawesi tidak dapat dipahami semata sebagai respons teknis terhadap meningkatnya ancaman terorisme maritim, melainkan sebagai bagian dari proses pembentukan regional security governance di Asia Tenggara. Dalam konteks Hubungan Internasional, konsep ini merujuk pada pengelolaan keamanan kawasan melalui kombinasi norma regional, mekanisme institusional, dan koordinasi lintas negara yang tidak sepenuhnya terpusat pada satu aktor dominan. Seperti ditegaskan oleh Storey (2018), pola kerja sama keamanan di kawasan Sulu–Sulawesi berkembang secara gradual sebagai respons terhadap kegagalan negara-negara pesisir dalam mengatasi ancaman lintas batas melalui pendekatan unilateral.

Berbeda dengan model aliansi militer formal, kerja sama keamanan di Laut Sulawesi menunjukkan karakter yang lebih fleksibel dan berbasis konsensus. Indonesia, Malaysia, dan Filipina memilih pendekatan koordinatif yang tetap menjaga sensitivitas kedaulatan masing-masing negara, sejalan dengan norma non-intervensi yang selama ini melekat dalam praktik keamanan ASEAN. Dalam kerangka ini, TCA dan TMP dapat dipahami sebagai security governance arrangement khas Asia Tenggara, di mana stabilitas dicapai melalui koordinasi operasional terbatas namun berkelanjutan, bukan melalui integrasi militer penuh (Raharjo et al., 2024; Tumilaar et al., 2025). Pendekatan ini mencerminkan adaptasi norma keamanan regional terhadap ancaman non-tradisional yang semakin kompleks.

11) Peran Aktor Eksternal dan Implikasinya terhadap Otonomi Keamanan Kawasan

Selain negara-negara pesisir, dinamika keamanan di Laut Sulawesi juga tidak terlepas dari keterlibatan aktor eksternal, khususnya Amerika Serikat dan Australia, dalam bentuk bantuan peningkatan kapasitas, pelatihan militer, dan dukungan intelijen. Keterlibatan ini, sebagaimana dicatat oleh Franco (2018), mencerminkan kepentingan strategis kekuatan besar terhadap stabilitas jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Asia Tenggara dengan Samudra Pasifik. Dengan meningkatnya ancaman terorisme maritim, dukungan eksternal sering kali dipandang sebagai faktor penguat kapasitas negara-negara kawasan.

Namun demikian, dalam perspektif Hubungan Internasional, keterlibatan aktor eksternal juga memunculkan dilema terkait otonomi keamanan regional. Di satu sisi, dukungan tersebut membantu menutup kesenjangan kapasitas, khususnya dalam bidang intelijen dan pengawasan maritim. Di sisi lain, ketergantungan yang berlebihan berpotensi mengurangi ruang pengambilan keputusan strategis negara-negara pesisir dan menimbulkan persepsi campur tangan kekuatan besar. Dalam konteks inilah kerja sama trilateral menjadi signifikan, karena memungkinkan Indonesia, Malaysia, dan Filipina tetap menjadi aktor utama dalam pengelolaan keamanan kawasan mereka sendiri, sekaligus membatasi dominasi aktor eksternal dalam arsitektur keamanan regional (Storey, 2018).

12) Evaluasi Efektivitas TCA dan TMP: Antara Penurunan Insiden dan Tantangan Keberlanjutan

Penurunan insiden penculikan dan serangan maritim di Laut Sulawesi sejak 2017 kerap dijadikan indikator keberhasilan Trilateral Maritime Patrol. Namun, penilaian semacam ini perlu ditempatkan secara lebih hati-hati. Hubungan antara patroli trilateral dan penurunan insiden tidak selalu bersifat langsung. Dalam konteks ini, patroli maritim lebih tepat dipahami sebagai faktor pendukung stabilitas, bukan sebagai penyebab utama. Franco (2018) menegaskan bahwa operasi keamanan domestik Filipina di darat memiliki peran yang jauh lebih menentukan dalam melemahkan kapasitas kelompok bersenjata.

Dengan kata lain, patroli maritim berfungsi lebih sebagai mekanisme risk containment daripada solusi struktural terhadap terorisme maritim. Ketergantungan pada kondisi keamanan domestik Filipina menimbulkan persoalan keberlanjutan, terutama ketika stabilitas politik dan keamanan dalam negeri mengalami fluktuasi. Tumilaar et al. (2025) menunjukkan bahwa kerja sama trilateral belum sepenuhnya diiringi dengan strategi jangka panjang yang mengintegrasikan dimensi pembangunan sosial-ekonomi di wilayah pesisir dan perbatasan. Tanpa pendekatan yang lebih komprehensif, efektivitas TCA dan TMP berpotensi bersifat temporer dan situasional.

13) Implikasi Teoretis bagi Studi Hubungan Internasional di Asia Tenggara

Kasus kerja sama trilateral di Laut Sulawesi memberikan kontribusi penting bagi pengembangan studi Hubungan Internasional, khususnya dalam kajian keamanan regional Asia Tenggara. Pertama, kasus ini menantang asumsi realisme klasik yang memandang keamanan sebagai fungsi eksklusif negara dan kekuatan militer. Pengalaman Laut Sulawesi menunjukkan bahwa ancaman non-tradisional dapat dikelola melalui mekanisme kooperatif yang bersifat terbatas namun efektif, tanpa harus membentuk aliansi militer formal.

Kedua, kerja sama ini memperkuat relevansi konsep cooperative security dan regional security governance dalam konteks Asia Tenggara. Sebagaimana dicatat oleh Raharjo et al. (2024), pengelolaan keamanan kawasan tidak selalu menuntut penyelesaian konflik secara tuntas, tetapi dapat difokuskan pada pencegahan eskalasi dan pengelolaan risiko. Dengan demikian, kolaborasi strategis Indonesia–Malaysia–Filipina di Laut Sulawesi dapat dipahami sebagai laboratorium empiris bagi penerapan pendekatan keamanan non-tradisional dalam Hubungan Internasional kontemporer, khususnya di kawasan dengan sensitivitas kedaulatan yang tinggi seperti Asia Tenggara

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama trilateral Indonesia–Malaysia–Filipina di Laut Sulawesi merupakan respons strategis terhadap karakter ancaman terorisme maritim yang bersifat lintas batas dan tidak dapat ditangani secara efektif melalui pendekatan keamanan nasional yang berdiri sendiri. Posisi strategis Laut Sulawesi sebagai jalur pelayaran internasional sekaligus wilayah perbatasan tiga negara menjadikan kawasan ini rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk aktivitas kelompok bersenjata seperti Abu Sayyaf Group. Dalam konteks tersebut, pembentukan Trilateral Cooperative Arrangement (TCA) dan Trilateral Maritime Patrol (TMP) mencerminkan pergeseran pendekatan keamanan dari unilateral menuju cooperative security yang lebih pragmatis.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerja sama trilateral berkontribusi terhadap penurunan intensitas insiden penculikan dan serangan maritim, khususnya melalui peningkatan koordinasi patroli laut dan udara serta pertukaran informasi intelijen antarnegara. Namun demikian, efektivitas kerja sama tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika domestik masing-masing negara, terutama operasi keamanan di Filipina Selatan yang menjadi faktor penting dalam menekan kapasitas kelompok bersenjata. Hal ini menegaskan bahwa patroli trilateral lebih berfungsi sebagai mekanisme pengendalian risiko (risk containment) daripada solusi struktural terhadap akar masalah terorisme maritim.

Dari perspektif Hubungan Internasional, kerja sama trilateral di Laut Sulawesi memperlihatkan bagaimana negara-negara Asia Tenggara menegosiasikan keseimbangan antara kedaulatan nasional dan kebutuhan keamanan kolektif. Alih-alih membentuk aliansi militer formal, Indonesia, Malaysia, dan Filipina memilih model koordinasi yang fleksibel dan berbasis konsensus, sejalan dengan norma keamanan regional yang menekankan

prinsip non-intervensi. Praktik ini menunjukkan bahwa *regional security governance* di Asia Tenggara berkembang secara gradual melalui mekanisme kerja sama terbatas namun berkelanjutan, yang mampu menyesuaikan diri dengan kompleksitas ancaman non-tradisional.

Selain itu, keterlibatan aktor eksternal seperti Amerika Serikat dan Australia menunjukkan bahwa keamanan maritim di Laut Sulawesi tidak terlepas dari dinamika geopolitik yang lebih luas. Meskipun dukungan eksternal berperan dalam meningkatkan kapasitas keamanan, kerja sama trilateral tetap menjadi instrumen penting bagi negara-negara pesisir untuk menjaga otonomi keamanan kawasan dan menghindari dominasi aktor eksternal dalam arsitektur keamanan regional.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi strategis Indonesia–Malaysia–Filipina di Laut Sulawesi bukan hanya respons kebijakan terhadap ancaman terorisme maritim, tetapi juga mencerminkan evolusi praktik keamanan regional di Asia Tenggara. Kasus ini menunjukkan bahwa cooperative security dan regional security governance dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam mengelola ancaman lintas batas, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti asimetri kapasitas, keterbatasan hukum internasional, serta ketergantungan pada stabilitas domestik negara anggota. Oleh karena itu, penguatan kerja sama trilateral yang diiringi dengan pendekatan non-militer dan pembangunan kawasan perbatasan menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas keamanan maritim secara berkelanjutan di masa depan.

REFERENSI

Air and Space Center. (2025). *Air and Space Power: Maritime Security*. Editor: Daria, Vincent and Docking, Graham. Canberra: Air and Space Center Banlaoi, R.C. 2005. Maritime Terrorism in Southeast Asia: The Abu Sayyaf Threat. Naval War College Review. 58(4): 1-18

Amling, A., Bell, C., Salleh, A., Benson, J., & Duncan, S. (2019). Stable Seas: *Sulu and Celebes Seas*. Broomfield: One Earth Future.

Beck, C.T. (2023). *The Value of Secondary Analysis for Qualitative Inquiry*. 52. 421-424

Cheong, Lyons, Houghton, Majumdar. (2023). *Secondary Qualitative Research Methodology Using Online Data within the Context of Social Sciences*. International Journal of Qualitative Methods. 22. 1-19

East R. (2018). 21st century piracy and the Abu Sayyaf Group. In: *Piracy in Southeast Asia*. London: Routledge; p. 23–45.

Franco J. (2018). Cooperation and governance in the Sulu–Sulawesi Seas. In: *Transnational Security in the Sulu Sea*. Singapore: Palgrave Macmillan; p. 57–78.

Haikal, Y.A.Wahyudin, Mahmuluddin. (2024). *Indonesia's Maritime Diplomacy* (Case Study: Maritime Terrorism in the Sulu-Sulawesi Seas). Mandala: Jurnal Hubungan Internasional. 7(2): 50-61

K.Y. Yaoren, R.A.S. Dass, J. Singh. (2021). Maritime Malice in Malaysia, Indonesia, and the Philippines: *The Asymmetric Maritime Threat at the Tri Border Area*. Report. Den Haag: International Centre for Counter Terrorism.

Maramis J, Rondonuwu F, Kairupan D. (2024). *Analisis diplomasi pertahanan Indonesia terhadap Malaysia dan Filipina dalam menghadapi ancaman terorisme di kawasan Laut Sulu–Sulawesi*. J Strategi Pertahanan. 2024;9(1):1–19.

Pradityo, Rahmadanu. (2024). *Maritime Insecurities in the Sulu and Sulawesi Seas*. Jurnal Sosial Humaniora. 17(1): 17-29

Raharjo S, Nugroho A, Pratama R. (2024). Cross-border cooperation as a method of conflict management: *a case study in the Sulu–Sulawesi Sea*. J Int Relat Stud. 2024;16(2):101–118.

RR. Maramis, Swastanto, Anwar. (2024). *Diplomasi pertahanan sebagai upaya mengamankan Laut Sulu dan Sulawesi dari kejahatan transnasional*. J Pertahanan dan Keamanan.;10(2):87–104.

Ruggiano dan Perry. (2019). Conducting Secondary Analysis of Qualitative Data: *Should We, Can We, and How?*. Qual Soc Work. 18(1): 81-97

Rustam, Bustami, Sabilla. (2022). *The Effectiveness of Indomalphi Trilateral Cooperation in Reducing Maritime Piracy by Abu Sayyaf Group in the Sulu-Sulawesi Sea*. Papua Journal of Diplomacy and International Relations. 2(2): 163-183

Storey I. (2018). Trilateral maritime patrols in the Sulu and Celebes Seas: *a work in progress. ISEAS Perspective*. 2018;(48):1–10.

The Diplomat. How Indonesia and the Philippines solved their maritime dispute. 2014 Jun 23. Available from: https://thediplomat.com/2014/06/how-indonesia-and-the-philippines-solved-their-maritime-dispute/

Tumilaar R, Wuryandari G, Lestari D. (2025). *Kerja sama Indonesia, Malaysia, dan Filipina dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di Laut Sulu–Sulawesi tahun 2016–2018*. J Hub Int Indones. 2025;12(1):45–63.

United Nations. (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). New York: United Nations; 1982.

University of Maryland National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism An Emeritus Centre of Excellence of the U.S. Department of Homeland Security: Sulu-Sea Attack graphics. Incident Summary for GTDID: 201606200018 (umd.edu)

Wismayana, W.M. (2023). *Kerjasama Trilateral Indonesia-Malaysia-Filipina di Perairan Sulu sebagai Alternatif Kerja Sama Keamanan Maritim*. Jurnal Keamanan Nasional. 9(1): 181-202